

FKI-1 Harus Kritis Terhadap Pemerintah

Sebelum dilantikanya pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Front Komunis Indonesia Utara (DPP-FKI1) Riau 21 Maret lalu, kini FKI1 Riau terus berbenah diri. Tidak hanya meniadakan kepengurusan di tingkat provinsi, tapi juga untuk kepengurusan di tingkat Kabupaten dan Kota 50 Riau.

Sebagai organisasi massa (Ormas) yang legal dan memiliki kedudukan terhadap kemajuan pembangunan dan mendasar akselerasi pembangunan, FKI-1 ingin terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kaitan pembangunan ini. Selain itu organisasi ini, diharapkan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kritis terhadap pemerintah tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan berdirinya ormas ini, diantaranya melakukan kontrol terhadap pemerintah, legislator dan yudikatif. "Saya kira, FKI-1 harus tetap kritis terhadap setiap kebijakan dan program pemerintah. Saya lagi yang akan mengawasi pemerintah, kalau bukan masyarakat, baik masyarakat maupun berkekan-



Dr. H. Hidar Faisal, Jember

pak dalam suatu organisasi," kata Ketua FKI1 Provinsi Riau, Dr. Muzar Purca, pada rapat pengurus FKI1 Riau yang digelar Selasa (24/3) lalu di Pekanbaru.

Selain melakukan kontrol dan pemantauan ke dalam, juga dilakukan upaya untuk mengembangkan setiap organisasi di

kabupaten/kota. "Sesuai dengan Rencana DPP FKI1 Riau, sekretaris di Riau menugaskan bahwa, para pengurus mandat pembentakan pengurus di tingkat kabupaten/kota selama di Riau, untuk segera memberikan laporannya pada pengurus di provinsi. Kematangan pada hakikatnya sudah hampir

sema kabupaten/kota di Riau dilakuk pembentakan, namun hingga kini baru beberapa daerah saja yang sudah memberikan laporan tingkat pengurus. "Tidaklah Kabupaten Suk dan Kota Pekanbaru sudah melimpahkan kepengurusannya. Sekarang kita menunggu laporan dari daerah lain seperti, Indragiri, Kuang, Dumai, Kampar dan Indragiri Riau.

Ditambahkan Rita, pihak DPP FKI1 Riau masih mendebat tentang waktu kepada pengurus mandat pembentakan dari minggu ke depan, lebih dari tanggal 25 Mei kedepannya. Apabila batas waktu tersebut tak tercapai ada respon positif, pengurus DPP FKI1 Riau akan memberikan sanksi berupa pencabutan mandat dan seterusnya mengeluarkan mandat baru. "Rami muda pada pengawasan mandat untuk menandatangani lencana ormas, tegas Rita.

Selain dari itu, pada rapat tersebut juga dibahas beberapa poin penting lainnya, seperti re-strukturisasi pengurus provinsi, penyetoran isi, misi dan goal setiap pembentakan lembaga-lembaga dan bidang usaha, rancangan program jangka pendek, rencana pendirian ahad dan hahul lain yang dianggap penting.

Acara yang dimulai sekitar pukul 19.30 hingga pukul 17.00

Wib. tersebut dihadiri sekitar 30 orang pengurus DPP FKI1 Riau, minus Dewan Penasehat. Maksud demikian, rapat dapat berjalan sesuai dengan rencana serta menyebarkan beberapa keputusan keorganisasian. Diantaranya, selain akan menjadi suatu ormas yang menitikberatkan pada lembaga pengontrolan terhadap gerak langkah pembangunan di era otonomi ini, juga FKI1 Riau akan membentak beberapa bidang usaha untuk ekuitasnya organisasi.

Untuk itu, Ormas yang berada di bawah Presiden RI, Susilo B. Yudoyono tersebut akan menentang kegiatan lainnya dengan membuka lembaga penelitian, lembaga usaha, lembaga bantuan hukum serta entertainment ke depannya. "Dengan demikian, kita berharap organisasi ini kedepannya akan menjadi suatu organisasi yang solid," ujar Dr. Hidar yang juga kandidat Bupati Kampar pada Pilkada mendatang.

Melipikan dengan muatan cukup kerendahan hati pada rapat tersebut, namun apa yang diharapkan dari pertemuan itu diharapkan dapat memberikan arti pada perkembangan organisasi FKI1 di Riau ke depannya. Rapat pukul 17.00 Wib, tepat selesai yang diawasi langsung oleh Ketua DPP FKI1 Riau, Dr. Muzar. **REN**